

PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK PMI DI MALAYSIA OLEH PUSAT PENDIDIKAN WARGA NEGERA INDONESIA

Avilla Adwidya Udhwalalita

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

M. Fathoni Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Keikutsertaan komunitas atau institusi masyarakat dalam pengentasan masalah sosial merupakan fenomena yang telah umum terjadi, terlebih saat kasus yang tengah diperhatikan sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh komunitas terkait. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) dalam pengentasan kasus lemahnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak Pekerja Migran Indonesia, terutama bagi para Pekerja Migran ilegal. Berangkat dari keadaan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk secara deskriptif membahas mengenai peran PPWNI dalam mewujudkan hak pendidikan anak pekerja migran ilegal asal Indonesia di Klang, Malaysia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kajian ini menggunakan konsep EFA (*Education for All*) dan menggambarkan PPWNI sebagai institusi penyedia pendidikan alternatif yang berperan penting dalam permasalahan ini yang dapat dilihat dari langkah yang dilakukan PPWNI dalam mewujudkan hak pendidikan anak Indonesia di Klang. Mulai dari pendaftaran yang mudah hingga biaya sekolah yang terjangkau, sesuai dengan indikator kinerja pemenuhan hak pendidikan anak.

Kata Kunci: Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI), Hak Pendidikan, Anak Pekerja Migran Indonesia, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap orang dan setiap orang berhak atas pendidikan. Sebagaimana Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang mengatakan bahwa “*everyone has the rights to education*”.¹ Maka tanpa terkecuali, setiap orang di dunia memiliki hak yang sama atas pendidikan, terutama bagi anak-anak dengan merujuk pada Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of child*), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Negara – Negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan dan mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama”.² Begitu pula Indonesia. Indonesia juga telah memiliki pasal-pasal yang mencakup tentang perlindungan hak pendidikan, diantaranya adalah: (1) UUD 1995, Pasal 31 Ayat 1; dan (2) Undang-Undang (UU) No. 39, Pasal 12 Tahun 1999. Sehingga akses ke layanan dan pendidikan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan komitmen global dan Konstitusi Indonesia.

Namun realitasnya, masih ditemukan banyak celah terkait penegakan hak bagi anak agar dapat menempuh pendidikan, salah satu permasalahan yang sering dibahas dalam kajian adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Malaysia merupakan negara tujuan bagi sebagian besar PMI. Tercatat bahwa terdapat 88.991 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2017, 90.671 pada tahun 2018, dan 79.663 pada tahun 2019.³ Karena kedua negara yang secara geografis saling berdekatan, tidak dapat dipungkiri bahwa PMI yang masuk ke Malaysia tidak hanya para imigran legal, tetapi juga ilegal. Setiap tahunnya, jumlah PMI yang dikirim ke Malaysia selalu tinggi dan hampir di seluruh Semenanjung Malaysia, berpengaruh juga pada jumlah PMI ilegal yang ikut meningkat. Oleh karena itu, masalah keterbatasan pendidikan bagi anak-anak PMI juga menjadi semakin kompleks.

¹ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights | United Nations,” diakses pada 27 Januari 2023, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

² UNTARI NARULITA MADYAR DEWI, “PERMASALAHAN DAN SOLUSI HAK PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA STUDI KASUS DI NEGERI JOHOR DAN NEGERI PAHANG, MALAYSIA,” 2018, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22327>. hal 2

³ BP2MI, “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” diakses pada 28 Januari 2023, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>.

Salah satu daerah yang juga PMI ilegal namun jarang dijadikan referensi penelitian adalah wilayah Klang Selangor, Malaysia. Kawasan Klang merupakan jalur mudah bagi PMI ilegal untuk masuk ke Malaysia, Indonesia sendiri tercatat sering mengembalikan data PMI ilegal di Pelabuhan Klang. Tahun 2005, Indonesia mengembalikan 500 PMI ilegal setiap hari.⁴ Kemudian, pada 2016, PMI ilegal memilih Pelabuhan Klang sebagai jalur pulang ke Indonesia dengan kapal ilegal untuk menghindari dokumen keimigrasian.⁵ Seiring dengan rumitnya persoalan PMI ilegal Klang, juga menambah daftar masalah sosial yang harus ditangani akibat PMI ilegal. Terlebih pendidikan adalah unsur penting dalam kehidupan, harapan dan masa depan, baik untuk negara maupun untuk individu itu sendiri. Menghadapi dilema masalah PMI ilegal dalam pendidikan di Klang Selangor, Malaysia, peneliti memutuskan untuk menangani meneliti isu ini.

Ada beberapa faktor yang membuat anak Indonesia ilegal di Klang: (1) masuk ke Malaysia secara ilegal bersama orang tuanya; (2) lahir dari orang tua yang tidak memiliki dokumen lengkap; (3) lahir dari perkawinan agama yang tidak diakui secara hukum atau bermasalah dengan akta nikah.⁶ Mayoritas WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap namun tetap bersikeras untuk tinggal di Malaysia dan tidak ingin kembali ke Indonesia

Terdapat sekolah yang menerima anak PMI ilegal dengan tangan terbuka di wilayah Klang, sekolah tersebut adalah Pusat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia (PPWNI). PPWNI adalah sekolah Indonesia yang berlokasi di Klang, Selangor, Malaysia. Merupakan sekolah bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya anak-anak PMI ilegal. Sekolah ini sudah ada sejak 2010 dan masih kuat sampai sekarang.⁷ Sekolah ini awalnya didirikan oleh seorang keturunan Melayu-Bugis bernama Raja Kamarudin, beliau juga merupakan penasehat komunitas Bugis Melayu-Indonesia di Klang, Selangor.⁸

Mulanya sekolah ini dikenal sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau disebut juga sebagai *Community Learning Center* (CLC). PPWNI adalah lembaga

⁴ Liputan 6 SCTV, "TKI Ilegal Memadati Pelabuhan Klang - News Liputan6.Com," diakses pada 28 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/96578/tki-ilegal-memadati-pelabuhan-klang>.

⁵ Adiatmaputra, "Banyak TKI Ilegal Berusaha Mudik Lewat Wilayah Perbatasan Dari Malaysia - Tribunnews.Com," diakses pada 28 Januari 2023, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/07/04/banyak-tki-ilegal-berusaha-mudik-lewat-wilayah-perbatasan-dari-malaysia>.

⁶ Wawancara Bu Nur Helny Kurwenty, Tenaga Pengajar Di PPWNI, Klang, Malaysia Pada 20 Oktober 2020

⁷ Wawancara Dengan Guru Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI, Klang

⁸ Kompas.com, "Anak Keturunan Bugis Telantar Sekolahnya Di Malaysia," diakses pada 28 Januari 2023, <https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.di.Malaysia>.

swadaya masyarakat untuk mewujudkan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya peminat pusat pembelajaran tersebut dan PPWNI pun mengajukan izin untuk pembangunan sekolah. Namun karena terdapat banyak siswa yang tidak berstatus legal, sekolah ini tidak dapat memperoleh izin dan diberi izin sebagai sekolah agama sebagai gantinya.

Peran PPWNI dalam mewujudkan hak pendidikan anak Indonesia di Klang Malaysia sangat penting. Sekolah ini menerima semua anak Indonesia dengan atau tanpa dokumen, menyambut semua anak dengan 'darah' Indonesia, baik dari kedua orang tua atau hanya salah satu orang tua yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).⁹ Sekolah ini merupakan harapan bagi anak-anak Indonesia yang tidak terdaftar di wilayah Klang, Selangor, Malaysia. Tidak hanya sebagai wadah belajar bagi anak-anak Indonesia tanpa dokumen, tetapi juga untuk anak-anak dengan kendala keuangan. Peneliti menjadikan PPWNI sebagai subjek penelitian dikarenakan peran penting PPWNI dalam mewujudkan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Selangor, Malaysia dengan merujuk pada komitmen global *Education for All* (EFA) yang dipelopori oleh UNESCO.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti: persepsi perilaku, motivasi, perilaku, dan lainnya.¹⁰ Secara keseluruhan, menjelaskan dalam bentuk verbal yang alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif juga dapat dimaksud dengan peneliti yang ingin menggambarkan gejala (fenomena) atau ciri-ciri tertentu daripada mencari atau menjelaskan hubungan antar variabel.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan keadaan subjek penelitian secara deskriptif tanpa mengubah data atau angka yang tidak sesuai dengan subjek penelitian.

Sedangkan dalam penggalan data penelitian, sumber data yang digunakan dalam

⁹ Wawancara Bu Nur Helny.

¹⁰ Tohirin, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Imbingan Konseling" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 3

¹¹ Wina Sanjaya, "Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, Dan Prosedur", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 59

penelitian ini yaitu berasal dari subjek penelitian yang diteliti, baik secara primer ataupun sekunder. Data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹²

Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan yakni perwakilan tenaga pendidik sekolah di Pusat Pendidikan Sipil Indonesia (PPWNI) di Klang, Malaysia dan perwakilan dari IYP sebagai LSM yang telah mendukung dukungan PPWNI. Kemudian data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari berita sekolah PPWNI dan artikel, yang pada gilirannya diperoleh dari hukum nasional dan internasional dan artikel yang menjelaskan perlindungan pendidikan semua individu, khususnya pendidikan anak. Dalam konteks penelitian ini adalah anak-anak PMI yang tinggal di Klang, Malaysia dan kesulitan dalam mengakses pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini memiliki tiga tahap analisis data: pengorganisasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³ Sedangkan dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan metode pengujian keabsahan data yang disusun oleh Lexy J. Moeleng. Menurut Moeleng, ada empat cara untuk menguji validitas data yaitu dengan pengujian kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.¹⁴

PEMBAHASAN

Secara umum, tujuan utama PMI untuk masuk dan menetap di Malaysia adalah Sabah, Sarawak, atau Johor Bahru. Namun sebenarnya masih banyak wilayah di Semenanjung Malaysia yang juga menjadi kota tujuan bagi PMI. Salah satu wilayah Malaysia dengan jumlah warga negara Indonesia yang cukup besar adalah Klang, Selangor, sebuah kota di yang berada sekitar 30kilometer dari sebelah barat Ibu Kota Malaysia.

Klang sendiri merupakan kota yang terkenal dengan pelabuhannya. Pelabuhan Klan terdiri dari tiga area: (1) Northport yang dikelola oleh tim Northport Malaysia dan berfungsi sebagai pelabuhan kargo domestik dan internasional; (2) Southport melayani lalu lintas

¹² Komariah, Riduwan (Ed), "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 145

¹³ Miles Dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru", 1992. Hlm 15-21.

¹⁴ Lexy J. Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya", 2011, Hlm. 248

barang di zona perdagangan bebas; (3) Westport dikelola oleh Westport Malaysia Berhad dan dioperasikan untuk penerbangan komersial dan jarak pendek.¹⁵ Letak geografis Klang dan keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut yang kemudian menjadi *entry point* potensial bagi para imigran ilegal untuk masuk ke Malaysia.

Masalah utama terletak pada keberadaan PMI ilegal. Ketika PMI ilegal menikah, jumlah PMI ilegal di klan Malaysia juga akan meningkat. Selain PMI yang bersangkutan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai anak-anak tidak sah atau anak-anak tidak berdokumen. Ketika seorang anak menjadi ilegal, anak itu yang menderita. Anak-anak akan kesulitan untuk mendapatkan haknya atas kehidupan yang layak, salah satunya adalah hak atas pendidikan.

PPWNI bertindak sebagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas dalam memberikan pelajaran moral kepada anak-anak tersebut hingga bagaimana anak-anak ini dapat dengan nyaman menyelesaikan pendidikan dasar wajib. Namun dalam prakteknya tentu tidak mudah, sejak awal pendirian hingga pelaksanaannya. Sekolah PPWNI berada di dalam area perumahan susun Taman Bayu, Klang. Terdiri dari lima ruang, dengan pembagian empat ruang kelas dan satu ruang guru bersamaan dengan tempat peralatan-peralatan kelas. Sekolahnya yang mulanya hanya menyediakan program belajar untuk anak Sekolah Dasar (SD), di tahun 2017 kemudian membuka program untuk anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga sekolah ini menyediakan dua jenjang pendidikan wajib bagi anak PMI, yakni SD dan SMP.¹⁶

Peran aktif PPWNI dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak PMI di Malaysia dengan cara pengadaan sekolah dilaksanakan dengan cara: (1) pengeluaran ijazah resmi; (2) pembenahan pengetahuan dan akhlak; (3) kemudahan pendaftaran sekolah; (4) jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; (4) pengurangan anak Indonesia tanpa pendidikan.

¹⁵ befreetour, "Pelabuhan Di Malaysia Sebagai Sarana Penyeberangan," diakses pada 28 Januari 2023, <https://www.befreetour.com/id/read/pelabuhan-di-malaysia-sebagai-sarana-penyeberangan>.

¹⁶ Wawancara Dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program Pada 19 Juni 2020,

A. Pengeluaran Ijazah Resmi

Ijazah terakreditasi merupakan dokumen penting yang membuktikan masa pendidikan formal bagi siswa, sehingga pada setiap kegiatan belajar mengajar sekolah harus mengeluarkan ijazah sebagai bekal bagi siswa di kemudian hari. Dalam hal ini, PPWNI sendiri telah berhasil untuk mengeluarkan dokumen ijazah resmi bagi para anak didiknya. Ijazah tersebut berasal langsung dari pihak KBRI. Di Malaysia sendiri hanya ada sekolah resmi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang dapat mengeluarkan ijazah demikian, sehingga untuk pengeluaran ijazah bagi anak didik PPWNI mengekor pada SIKL.

PPWNI memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak PMI di wilayah Klang dengan penyediaan sekolah dan ijazah resmi. Anak-anak di daerah Klang juga tidak lagi harus bersusah payah mencari sekolah. Selain itu, sekolah ini tidak hanya menjangkau anak-anak Indonesia di sekitar perumahan saja, tetapi sekolah ini juga menjangkau anak-anak Indonesia yang berjarak minimal sekitar 30 kilometer yang dapat mengikuti PPWNI, dan tidak ada sekolah Indonesia seperti PPWNI di daerah Selangor yang dapat memberikan dokumen ijazah resmi.¹⁷

B. Pembinaan Pengetahuan dan Akhlak

Keberadaan sekolah PPWNI sangat bermanfaat terutama dalam pembentukan akhlak untuk anak PMI, memperkenalkan pendidikan kepada anak PMI yang kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar seperti membaca, menulis dan menghitung. Menjauhkan anak PMI dari kebodohan. Seperti yang dikatakan oleh ahli sebelumnya, jika PMI tidak menaruh perhatian pada pentingnya pendidikan anak dan tidak membuat sekolah, maka kemungkinan besar anak-anak PMI sama sekali tidak akan bisa mengakses pendidikan mengingat bagaimana orang tua mereka yang tidak berdaya dalam mengupayakan pendidikan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Nur Helny Kuswanti, selaku salah satu staf pengajar PPWNI menyatakan bahwa:

“Jadi saya pikir sekolah ini penting untuk kedepannya bertahan kesini, karena untuk membantu anak – anak bisa belajar, ya walaupun kita tidak mempunyai

¹⁷ Wawancara dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program Pada 19 Juni 2020

target yang lebih, targetnya hanya anak itu agar tidak menjadi anak yang bodoh, tidak menjadi anak yang liar tanpa akhlak, tanpa ilmu agama begitu. Anak bisa membaca menulis, mereka tahu mana yang baik, mana yang salah, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sama yang tidak, tahu sopan santunya sama orang tua, sama lingkungan. Menurut saya anak bisa seperti itu berarti sekolah ini sudah sukses, walaupun suksesnya dalam hal yang minimal seperti itu, menurut saya sudah lebih baik, dari pada anak yang tidak sekolah sama sekali”¹⁸

Oleh karena itu, peran Sekolah Pusat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia (PPWNI) di Klang, Malaysia sangat penting dalam kelanjutan perwujudan hak pendidikan anak PMI.

C. Kemudahan Pendaftaran Sekolah

Mengingat penjelasan sebelumnya bahwa banyak anak PMI Indonesia yang kesulitan menemukan sekolah yang dapat menerima mereka, seperti dalam penelitian ini di Klang, Malaysia. Persyaratan telah ditetapkan untuk pendaftaran sekolah, salah satu yang terpenting adalah dokumen anak.

PPWNI memiliki proses yang mudah, terutama terkait kelengkapan dokumen, karena pada dasarnya sekolah ini bertujuan untuk memenuhi hak anak Indonesia atas pendidikan di Malaysia di wilayah Klang. PPWNI memberikan cahaya harapan bagi anak-anak PMI untuk dapat dengan mudah mengakses pendidikan, bahkan bagi mereka yang tidak berdokumen sekalipun.

“... Iya memang jika mendaftar harus membawa identitas diri, seperti akta kelahiran/ sijil lahir, Kartu Keluarga (KK), dan paspor. Ada anak – anak yang mempunyai dokumen lengkap kecuali paspor yang ada visanya, jika seperti itu tidak masalah, langsung kami terima. Tapi ada juga yang sama sekali tidak punya apa – apa, jadi mau bagaimana lagi. Asalkan orang tuanya (bapak/ibu) masih WNI, pasti diterima.”¹⁹

¹⁸ Wawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020

¹⁹ Ibid, Wawancara Dengan Bu Helni.

D. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

PPWNI menawarkan pendidikan terbaik yang bisa ditawarkan sekolah ini kepada para siswanya. Juga mengenai kondisi setempat, ketika anak telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar, maka selanjutnya anak-anak memerlukan pendidikan lanjutan yang layak.

Karena anak – anak masih membutuhkan pendidikan lanjutan, serta tidak ada sekolah yang mau menerima mereka dengan kondisi yang tidak berdokumen. Sebenarnya mereka meminta ada SMA tapi kami yang tidak mampu, mengingat pelajaran SMA sudah semakin susah serta minimnya guru di Klang, untuk pembukaan SMPnya kalau tidak salah pada 2017.²⁰

Dengan segala keterbatasannya, PPWNI sebagai bagian dari masyarakat sosial memiliki peran tersendiri dan sadar akan pendidikan anak-anak di wilayah Klang Malaysia. Selain sekolah dasar yang sudah ada sejak berdirinya sekolah ini, sekolah ini juga membuka sekolah menengah pertama (SMP) untuk pendidikan lanjutan anak-anak Indonesia di Klang, Malaysia.

E. Pengurangan Anak Indonesia Tanpa Pendidikan

PPWNI telah berperan sangat besar dalam pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia dan pengurangan anak Indonesia tanpa pendidikan di Klang, Malaysia. Dapat terlihat dari jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahunnya.



Grafik 1.1 Jumlah Siswa PPWNI Tahun 2016 – 2020

Sumber: Data PPWNI

²⁰ Ibid.

Merujuk pada **Grafik 1.1**, setiap tahun jumlah peserta didik di PPWNI terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Bersamaan dengan naiknya angka peserta didik di PPWNI, maka PPWNI telah mengurangi jumlah anak Indonesia tanpa pendidikan di wilayah Klang Malaysia. Hal ini dipandang sebagai bagian yang sangat positif dalam mewujudkan hak anak Indonesia atas pendidikan.

Keberadaan sekolah PPWNI ini juga merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang menyangkut prinsip perlindungan hak anak di seluruh dunia, sebuah untuk Realisasi hak atas pendidikan yang layak bagi anak-anak, perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi 44/25), yang mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990.²¹

Oleh karena itu, hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan harus dilindungi dan tidak boleh ada pihak yang mendiskriminasikannya. Dengan dibentuknya PPWNI, masyarakat ikut berperan dalam kancah kemanusiaan pengasuhan anak. Hingga anak-anak Indonesia di Klang, Malaysia menerima wajib belajar.

F. Indikator Pencapaian PPWNI

Berikut adalah indikator pencapaian PPWNI dalam menjalankan misinya memenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia di Klang, Malaysia berdasarkan Education for All. Indikator pertama adalah *Rights to Education*, PPWNI menjalankan misinya untuk memenuhi hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia. Ketika tidak ada sekolah, apalagi sekolah dasar, anak paling berisiko dan terkena dampak langsung. Sesuai dengan Pasal 26(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages...*"²²

Yang kedua adalah *Education for Humanity*. Pendidikan tidak hanya

²¹ United Nations, "Convention on the Rights of Child Adopted And Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 Of 20 December 1990, in Accordance with Article 49," 1990, http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=8331&keywords=.

²² United Nations, "Universal Declaration of Human Rights | United Nations," diakses pada 28 Januari 2023, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

mengajarkan ilmu terapan dan ilmu alam, tetapi juga mengajarkan tentang humanisasi. Pendidikan meliputi pembentukan akhlak dan budi pekerti. PPWNI mentransformasikan anak – anak yang tidak tahu bagaimana menghargai, menyayangi dan menyayangi orang lain. PPWNI telah mengajarkan anak-anak bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik dan anak-anak belajar banyak tentang orang dan makna hidup. Sehingga segala bantuan yang telah diberikan PPWNI telah sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 26(2) menyatakan: “*Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*”²³

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peran Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) dalam mewujudkan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa PPWNI sangat berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di Klang, Malaysia, terutama yang tidak memiliki dokumen resmi seperti akte kelahiran namun masih terhubung dengan Indonesia melalui orang tuanya. PPWNI juga telah berhasil memenuhi metrik yang dapat dicapai sekolah dalam mewujudkan hak atas pendidikan. PPWNI juga merupakan bentuk dari implementasi konsep *Education for All* (EFA) inisiatif UNESCO dan diakui secara global.

REFERENSI

- “Banyak TKI Ilegal Berusaha Mudik Lewat Wilayah Perbatasan Dari Malaysia - Tribunnews.Com.” Accessed January 28, 2023. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/07/04/banyak-tki-ilegal-berusaha-mudik-lewat-wilayah-perbatasan-dari-malaysia>.
- befreetour. “Pelabuhan Di Malaysia Sebagai Sarana Penyeberangan.” Accessed January 28, 2023. <https://www.befreetour.com/id/read/pelabuhan-di-malaysia-sebagai-sarana-penyeberangan>.
- BP2MI. “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.” Accessed January 28, 2023. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan->

²³ Ibid.

dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019.

- J. Moleong, Lexy “Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya”, 2011.
- Komaridah, Riduwan (Ed), “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Kompas.com. “Anak Keturunan Bugis Telantar Sekolahnya Di Malaysia.” Accessed January 28, 2023. <https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.di.Malaysia>.
- Liputan 6 SCTV. “TKI Ilegal Memadati Pelabuhan Klang - News Liputan6.Com.” Accessed January 28, 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/96578/tki-ilegal-memadati-pelabuhan-klang>.
- Sanjaya, Wina. “Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, Dan Prosedur”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Tohirin, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Imbingan Konseling” (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Miles dan Huberman, “Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru”, 1992.
- NARULITA MADYAR DEWI, UNTARI. “PERMASALAHAN DAN SOLUSI HAK PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA STUDI KASUS DI NEGERI JOHOR DAN NEGERI PAHANG, MALAYSIA,” 2018. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22327>.
- Nations, United. “Universal Declaration of Human Rights | United Nations.” Accessed January 28, 2023. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- United Nations. “Convention on the Rights of Child Adopted And Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 Of 20 December 1990, in Accordance with Article 49,” 1990. http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=8331&keywords=.
- . “Universal Declaration of Human Rights | United Nations.” Accessed January 27, 2023. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Wawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program Pada 19 Juni 2020.